

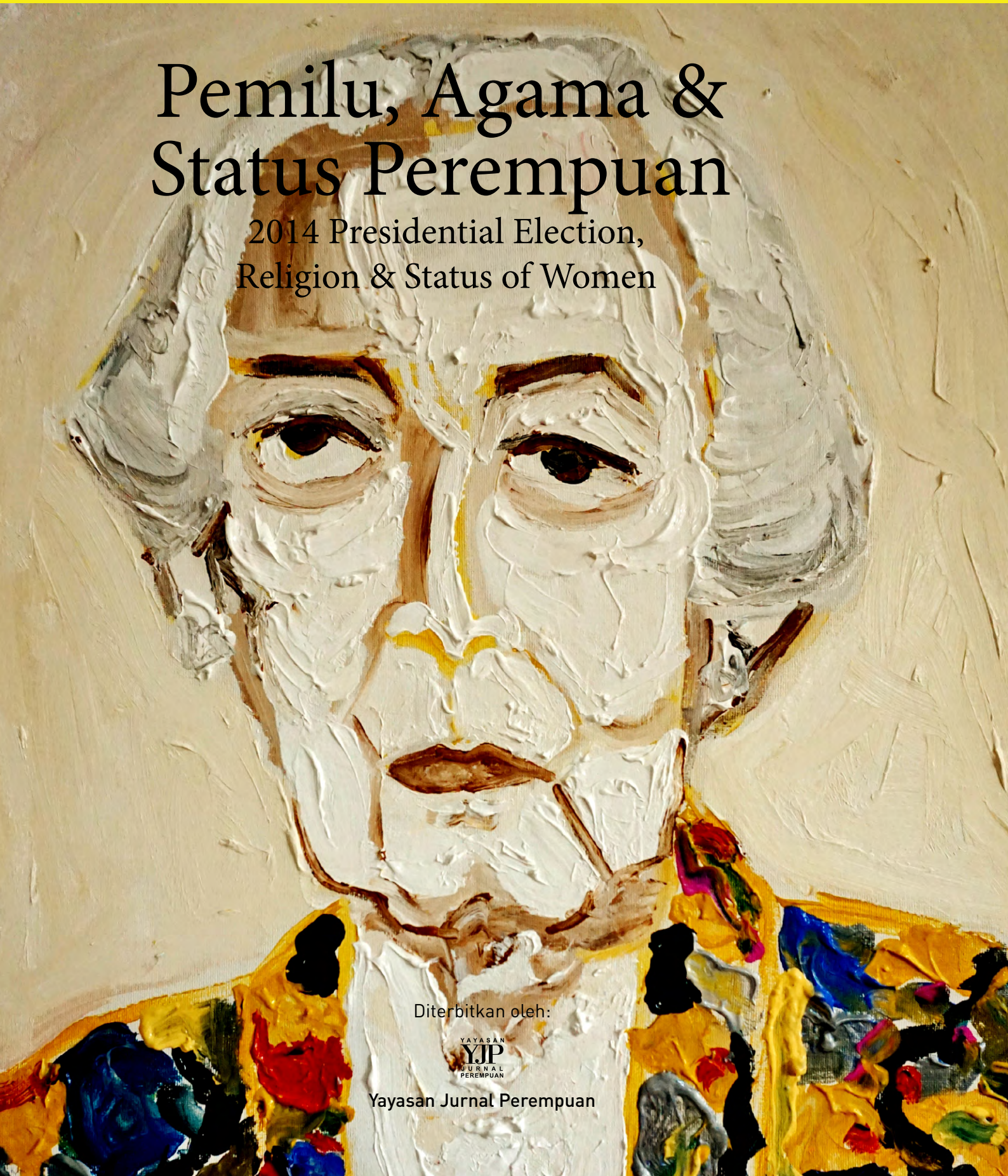
Pemilu, Agama & Status Perempuan

2014 Presidential Election,
Religion & Status of Women

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

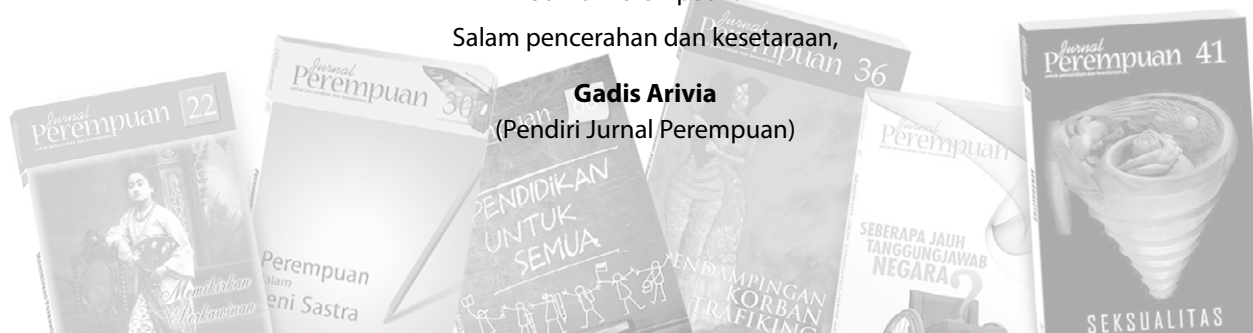
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik.....	iii-iv
Artikel / Articles	
• Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / <i>Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election</i> Rocky Gerung	175-182
• Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / <i>Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election</i> ... Gadis Arivia	183-189
• Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir <i>Al Hurriyah</i> , <i>Al Musawah</i> , <i>Al Karamah</i> dan <i>Al Adalah</i> / <i>Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah</i> Husein Muhammad	191-196
• Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / <i>Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History</i> Nihayatul Wafiroh	197-205
• Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / <i>The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics</i> Ira D. Mangililo	207-219
• Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / <i>Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women</i> Indraswari	221-226
• Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / <i>Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election</i> Anita Dhewy	227-232
• Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / <i>Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other</i> Dewi Candraningrum	233-240
Wawancara / Interview	
• Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / <i>Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!"</i> Dewi Candraningrum	241-243
Kata dan Makna / Words and Meanings	245-246
Profil / Profile	
• Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme Agama" / <i>Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism"</i> Mariana Amiruddin	247-251
Resensi Buku/ Book Review	
• Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / <i>Political Roles of Women against Fundamentalism</i> Anita Dhewy	253-256

“Status Perempuan dalam Politik”

Asia adalah rumah bagi 60 persen lebih penganut agama-agama mayoritas sekarang seperti Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Islam, dan banyak aliran kepercayaan dan keyakinan lainnya. Dan Indonesia adalah rumah dari penduduk Muslim terbesar di dunia. Asia tenggara khususnya memiliki karakter yang kuat sekali dalam perbedaan lanskap kebudayaan dengan konstelasi politik, ekonomi, demografi dan tradisi sosial yang sangat beragam. Aliran kebudayaan transversal bersinggungan dengan aliran agama seringkali mengawinkan kelompok-kelompok etno-religius. Dan dalam hal ini, modernitas menyumbang kelahiran dari fundamentalisme agama dalam politik kenegaraan. Dan korban paling nestapa dari kelahirannya adalah perempuan dan para Liyan. Lanskap baru ini mempengaruhi dan memberikan kontribusi pada bagaimana perempuan menggunakan agensinya, menggunakan ruang untuk melakukan manuver dalam arena publik yang bersifat strategis dan politis. Prediksi bahwa sekularisme akan tetap bertahan dan berkuasa dalam pertumbuhan kehidupan negara dan politik di Asia Tenggara pada dekade terakhir dipatahkan oleh semakin besarnya pengaruh agama terhadap negara melalui partai politiknya, terutama Indonesia dan Malaysia. Agama tidak hanya merangsek dalam arena publik tetapi juga masuk dalam proses-proses dan pokok-pokok peristiwa politik dan kenegaraan. Lalu bagaimana implikasinya bagi kehidupan politik dan sosial? Banyak feminis ragu dan tak percaya karena yang memenangkan dan menguasai kursi-kursi politik dan parlemen adalah tafsir-tafsir agama yang misoginis dan tak ramah pada Liyan. Fragmentasi politik dan misoginisme baru bermunculan dalam wajah politik dunia. Bahkan institusi hegemonik seperti negara dan pasar telah diubah oleh agama umat tertentu dan kemudian banyak penganut agama lain sangat dirugikan karenanya. Matra gender diabaikan dan jadi tema

semena-mena dalam pertarungan politik, baik skala internasional, nasional dan lokal.

Meskipun Indonesia menjadi salah satu contoh terbaik praktek Islam moderat dan progresif, akan tetapi wajah-wajah tafsir yang tak ramah pada perempuan, minoritas seksual, etnis minoritas dan kelompok rentan lainnya masih mewarnai perjalanannya pada dekade terakhir. Tahun 1980-an merupakan tahun kebangkitan bagi revivalisme Islam di Indonesia, kemudian berkembang dengan pesat setelah jatuhnya rejim otoriter Orde Baru, Soeharto di tahun 1998. Partai-partai politik berbasis Islam (seperti PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB) berdiri dan sampai sekarang kuat menancapkan pengaruhnya dalam sistem politik dan kenegaraan di Indonesia. Dan perolehan suara di Pemilu Legislatif 9 April kemarin mereka mengalami kenaikan suara seperti yang dikabarkan dalam rubrik *RISSET Jurnal Perempuan* 82 kali ini. Dus, agama dan politik tetap tidak bisa dipisahkan dalam urusan kenegaraan. Tak hanya di pusat, sejak tahun 2001 Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu contoh ekstrem dimana perempuan kemudian banyak dikebiri hak-haknya melalui Qanun Syariah—berbeda jauh dari jaman Cut Nyak Dien dimana perempuan jauh lebih merdeka dan perkasa. Perempuan Aceh kini banyak sekali dibatasi dari cara berpakaian, berkendara, berada di ruang publik, sampai cara perempuan berswara dan tertawa pun juga diatur. Kecurigaan besar atas tafsir tak ramah gender yang masuk dalam diskursus politik ini bukan tanpa alasan.

Kerja keras perempuan dalam dua organisasi massa Islam terbesar Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah untuk menampilkan wajah Islam yang tidak misoginis terbengkalai dan dipukul mundur oleh wajah tafsir baru yang tak lagi ramah pada para Liyan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah anggota legislatif jadi perempuan di parlemen 2014 ini, dimana perempuan hanya menempati sekitar 17% dari seluruh jumlah

kursi. Ini bukan kabar gembira. Status perempuan masihlah (l)iyah. Revivalisme Islam dalam politik, seperti dalam temuan Susan Blackburn dalam bukunya *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2004) justru menambah beban terhadap perempuan dan memperlihatkan wajah diskriminatifnya yang kentara. Setiap kali didiskusikan agama dan politik, maka aspek stabilitas dan pertahanan merupakan pokok pertama

yang dibicarakan. Sedangkan nasib perempuan dan para (l)iyah seringkali diabaikan. Tugas dari kajian Jurnal Perempuan pada edisi kali ini adalah untuk menarasikan kajian analitik untuk mempertanyakan posisi agama dalam politik dan negara secara ontologis; serta memetakan konsekuensi dan implikasinya bagi kesetaraan gender dan keadilan bagi (l)iyah dalam narasi Pileg dan Pilpres tahun 2014 ini. **(Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi).**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Rocky Gerung. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia.
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014

Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 175-182, 4 daftar
pustaka.

Feminist politics is a perpetual investment in a just civilization. It awares of the injustice structure that is inherently located within the sociological body of patriarchal system. It needs more than voluntary-echo in democracy rather a strong conceptual tools that will enlighten the dialectic transport of communication in democratic system. Any feminists shall be alert to watch and guard, as well as, cynically, radically, monitor the run of the new-elected president—whether he will bring mandate of equality or not. Short-term strategy has been invested to block the new-order regime to take control; and long-term strategy shall be invested to guarantee the system of equality in the new cabinet.

Keywords: ethics of feminism, women, theocracy-patriarchy, presidential election.

Politik feminis adalah investasi peradaban. Politik feminis telah lama mengetahui bahwa menjadi perempuan dan mengalami ketidakadilan adalah satu paket sosiologi yang diselenggarakan oleh sistem patriarki. Bahwa keperluan perubahan politik tidak saja memerlukan partisipasi lapangan, tapi terlebih ketajaman diskursus dalam membaca struktur ketidakadilan itu. Itulah sebabnya diperlukan terus-menerus pemahaman teoretik yang kuat agar euforia politik lapangan itu tidak menghanyutkan peralatan-peralatan konseptual feminis, yaitu peralatan pikiran dan keyakinan tentang keadilan yang lebih radikal. Politik feminis juga memahami bahwa upaya menyelenggarakan keadilan itu, pada momen-momen kritis seperti Pemilu, memerlukan “strategi jangka pendek” untuk secara minimal mencegah masuknya watak otoritarian dalam politik.

Kata kunci: etika feminis, perempuan, teokrasi-patriarki, pemilihan presiden

Gadis Arivia. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia.
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014

Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 183-189, 16 daftar
pustaka.

This paper investigates stereotype of first ladies and image being built during 2014 Indonesia presidential election. Wives of candidates in the election are highly accomplished as well as being graduated from universities, yet these facts are not exposed adequately in the media as part of public education on equality. Most of the time, they are being posited as faithful-partner and bold-supporter of their husbands/partners. Interviews held by the media frequently narrate the drama within the house, family, and their romance. Their career and professionalism are being hidden from the public. Platform

of empowerment and gender equality are highly cultivated, promoted, and campaigned by political-parties as well as NGOs, yet missed the wives to be involved. The capacity of the presidential candidate's wives on gender, equality and women's empowerment platforms designed by the political parties need to be promoted and scrutinized.

Keywords: first ladies, wife, career, presidential election.

Tulisan ini mengkaji stereotip ibu Negara dan *image* yang terbangun pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Para istri capres dan cawapres memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cerdas serta berpengalaman, namun sayang sekali, perihal ini tidak digali media dan menjadi representasi untuk pendidikan publik. Kecerdasan mereka tidak diekspos dan tidak diberikan panggung. Mereka diposisikan sebagai pendamping setia suami dan pendukung pendapat suami mereka. Wawancara yang dilakukan media hanya seputar kegiatan rumah tangga atau drama kisah cinta mereka. Platform pemberdayaan perempuan tidak banyak berbunyi di kedua kubu karena penjelasan platform ini diambil alih oleh partai atau LSM perempuan yang telah memihak. Padahal penguasaan istri-istri capres dan cawapres dalam mendorong platform pemberdayaan perempuan yang disusun oleh tim kampanye penting untuk digali.

Kata Kunci: ibu negara, istri, karir, Pilpres.

Husein Muhammad. Komisioner Komnas Perempuan. JL.
Latuharhary No.4B, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta
10310, Telp. (021) 3903963

Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah dan Al Adalah

Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah.

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 191-196, 6 daftar
pustaka.

This paper examines theological sources of Islam on the status of women in Politics. Al Quran states that equality between men and women are guaranteed in politics such as in Quran: Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71. Islamic politics based on the following postulates: first, freedom (*al Hurriyyah*). Human beings are only serving God. Second, equality (*Musawah*, non-discriminatory). All human being are equal in front of Allah. Third, respect to other human beings (*Karamah al Insan*/ preserving the other human's dignity). Fourth, justice (*'Adalah*). Theological sources of Islam has given foundation for the contemporary status of women in politics which had long been stripped away due to misogynistic interpretation of Quran. Quran has *ontologically supply equality and justice to human rights that can be used in politics and state affairs.*

Keywords: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politics

Kajian ini membahas sumber-sumber teologi dalam Islam perihal status perempuan dalam politik. Alquran menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan politik tersebut (Q.S. Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71). Prinsip politik Islam berdasarkan beberapa postulat: *pertama*, kebebasan (*al Hurriyyah*). Manusia hanya menjadi hamba bagi Tuhan. *Kedua*, kesetaraan (*Musawah/Equality* dan *non diskriminasi*): semua manusia adalah sama dan setara di hadapan Allah. *Ketiga*, penghormatan manusia (*Karamah al Insan/Dignity*). *Keempat*, keadilan (*'Adalah/Justice*). *Sumber-sumber teologi Islam memberikan landasan fundamental bagi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan bersamanya di muka bumi ini. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tentang kesetaraan dalam politik dan kenegaraan.*

Kata kunci: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politik.

Nihayatul Wafiroh. Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta. Gajah Mada Graduate School Building, III-IV Floor, Jl. Teknik Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281. Telephone/Fax : +62-274-562570

Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi

Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 197-205, 21 daftar pustaka.

Indonesian Muslim women had long been an inseparable part from political activities since the colonial period to present era. During colonial era, although they did not work formally under certain Islamic women's organizations, they made real contributions to the women's political movement in Indonesia since they formed women's branches of existing mass organizations. Fatayat, this organization is the sister branch of the largest Islamic organizations in Indonesia: Nahdlatul Ulama. This paper narrates that the involvement of Fatayat in politics had its historical and genealogical roots since Soekarno era. Sukarno facilitated Fatayat to develop power capacity in politics. However, during Soeharto era Fatayat experienced a setback due to New Order's control toward women's organization with its "ibuisism" ideology. In order to maintain its existence, Fatayat decided to collaborate with government by incorporating state's program such as PKK, Posyandu into their activities while also made network with national and international funding organization.

Keywords: politics, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Perempuan Muslim Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik sejak era kolonial sampai dengan sekarang. Selama era kolonial, organisasi perempuan Muslim merupakan cabang dari organisasi masa muslim. Fatayat adalah saudara bagi organisasi massa bernama Nahdlatul Ulama. Mereka memberikan kontribusi besar dalam proses pemberdayaan perempuan. Tulisan ini menarasikan keterlibatan Fatayat dalam politik yang secara genealogis ada sejak jaman Soekarno. Soekarno memberikan kesempatan pada Fatayat untuk mengembangkan kapasitas politiknya. Akan tetapi, kemudian mengalami kemunduran pada era Soeharto. Soeharto mengontrol organisasi-organisasi perempuan melalui ideology "ibuisisme" Negara. Fatayat kemudian memutuskan meleburkan diri dalam kebijakan pemerintah tersebut dengan terlibat dalam PKK, Posyandu, dll—meskipun juga menerima dan mengembangkan jaringan dengan dunia luar.

Kata kunci: politik, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Ira D. Mangililo. Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711, Telp 0298-321212

Saudari-Saudari yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan

The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 207-219, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

The purpose of this paper is to understand the role of Indonesian Christian women in the public sphere, especially in the realm of politics. This article aims to reconstruct the role of Israelite women who lived in pre-monarchic Israel using sociological, social science, anthropological, and archeological methods. The result of my analysis shows that the demands of war that occurred continuously in the territory of ancient Israel and the opening of new land in the mountainous regions of Israel required the active participation of women to not only be involved in the reproduction but also the production—an activity that belonged to male members of the family. This phenomenon creates a balance in the division of labor between men

and women which of course increased the status of women in society. The result of this reconstruction that underlines the active role of women in the public sphere in the world of ancient Israel becomes an important model for Christian women in Indonesia today to take an active role in the public sphere, especially in politics.

Keywords: women, public sphere, politics, Christian theology.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memahami peran perempuan Kristen Indonesia di ruang publik khususnya di bidang politik. Tulisan ini hendak merekonstruksi peranan perempuan yang hidup pada jaman pra-monarki Israel. Hasil analisa saya menunjukkan bahwa tuntutan peperangan yang terjadi terus-menerus di wilayah Israel kuno dan pembukaan lahan baru di wilayah-wilayah pegunungan Israel menuntut adanya peran aktif dari perempuan untuk tidak hanya terlibat di bidang reproduksi melainkan juga bidang produksi—suatu aktivitas yang biasanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Fenomena ini menciptakan keseimbangan di dalam pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan yang tentu saja meningkatkan status perempuan di dalam masyarakatnya. Hasil rekonstruksi yang menggarisbawahi peranan aktif perempuan di ranah publik di dunia Israel kuno ini akan menjadi model yang penting bagi para perempuan Kristen di Indonesia untuk turut berperan aktif di dalam ranah publik terutama di bidang politik.

Kata kunci: perempuan, ruang publik, politik, teologi Kristen.

Indraswari. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jalan Ciumbuleuit No.94, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40141 . Telp. (022) 203 2655; (022) 204 2004, Faks. (022) 203 1110

Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan

Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 221-226, 18 daftar pustaka.

This article discusses three main issues i.e. women, politics of identity and religion as well as the relationship among them. The three are binded by cultural prejudice casted upon female bodies, specifically in discriminatory by-laws in 342 regions in Indonesia. The discussion takes place within the framework of Indonesia's decentralization which has been marked with among other the implementation of public policies which targeting women's bodies and behavior in the name of morality and religion. The cultural notion is also discussed to provide a better understanding on the complexity of the relationship among the three issues as previously mentioned. This study shows that religion has been used and politicized to ostricised women's rights and other minorities' and vulnerable groups' rights.

Keywords: cultural prejudice, by-laws, religion, women.

Artikel ini membahas tiga isu utama yaitu perempuan, politik identitas dan agama serta relasi di antara ketiganya. Ketiganya diikat oleh prasangka budaya atas tubuh perempuan, terutama dalam 342 perda diskriminatif. Pembahasan dibingkai dalam konteks Indonesia di era desentralisasi yang ditandai dengan antara lain penerbitan berbagai kebijakan publik yang menyangkut tubuh dan perilaku perempuan atas nama moralitas dan agama. Sisi budaya dibahas guna lebih memahami kompleksitas relasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama telah dipolitikasi untuk meminggirkan suara perempuan dan kelompok rentan lain.

Kata kunci: prasangka budaya, peraturan daerah, agama, perempuan.

Anita Dhewy. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014

Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 227-232, 7 daftar pustaka.

Female representation in parliament is decreasing in 2014, from 18 to 17 percent. This is not good news at all. It deteriorates further with no focus on women's status in each of presidential candidates. Status of women, sexual minorities, and other vulnerable groups were not becoming focus of issues in debates. Women's movement in near future and in the long run shall fight hard to tackle previous problems. This 2014 General Election has been a powerful tool as well for women to participate and to voice their concern regarding issues of equality and justice. This study unearths how women usher peaceful campaign during the parliament and presidential elections—showing their political engagement to Indonesia as democratic state.

Keywords: general election, parliament election, roles of women.

Representasi perempuan di parlemen menurun di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini, dari 18 persen di 2009 menjadi 17 persen di tahun ini. Sementara, status perempuan belum terlihat menonjol dalam konteks visi misi Capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, yaitu tidak menjadi materi dalam perdebatan. Ke depan gerakan perempuan perlu berjuang lebih panjang lagi. Terlepas dari tantangan tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menjadi alat partisipasi rakyat yang strategis dan bermakna. Hal ini memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, produk Pemilu yaitu parlemen dan presiden-wakil presiden juga relatif bisa dikritik. Kajian ini memaparkan bagaimana perempuan berusaha keras untuk mengawal pemilu damai, demikian juga memajukan suara dan partisipasinya secara politis.

Kata kunci: Pemilu, Pileg, Pilpres, peran perempuan.

Dewi Candraningrum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Jawa Tengah 57102

Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 233-240, 8 gambar, 6 daftar pustaka.

This research explains the interaction of religion and politics during the Legislative Election of April 9 and the Presidential Election of July 9, 2014 in considering the status of women. Feminist approaches are often suspicious or cannot believe how the alliance of these two terms (religion and politics) can truly serve the mandate for gender justice and social justice. Explanation of the General Election data affirms the vulnerable status of women and other groups, both within the structure of political parties, proportion of MP's and in the executive development paradigm of the incoming President. The entire women's movement, paradigmatically and practically, needs to work together, shoulder to shoulder, in order to analyse, criticise and nurture these narratives of justice for an equal society in the coming 2014-2019 cabinet period.

Keywords: Election, women, politics, religion, cabinet.

Kajian ini menjelaskan interaksi antara agama dan politik selama Pemilu 9 April dan Pilpres 9 Juli 2014 dalam kaitannya dengan status perempuan. Pendekatan feminis masih mencurigai bagaimana aliansi antara agama dan politik sesungguhnya tak melayani mandat kesetaraan. Penjelasan dari data Pemilu 2014 mengafirmasi status rentan perempuan dan minoritas Liyan baik dalam struktur dan budaya partai politik, yaitu proporsi anggota legislative dan eksekutif. Seluruh gerakan perempuan, dalam fakta ini, perlu bergandengan tangan untuk bekerjasama untuk menulis ulang keadilan gender dalam masyarakat untuk perubahan pada periode kabinet 2014-2019.

Kata kunci: Pemilu, perempuan, politik, agama, kabinet.

Genealogi Politik Islam *Fatayat* di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi

Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History

Nihayatul Wafiroh

Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta
Gajah Mada Graduate School Building, III-IV Floor, Jl. Teknik Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telephone/Fax : +62-274-562570

ninikwafiroh@gmail.com

Naskah Diterima 1 Mei 2014. Direvisi 18 Juni 2014. Disetujui: 7 Juli 2014

Abstract:

Indonesian Muslim women had long been an inseparable part from political activities since the colonial period to present era. During colonial era, although they did not work formally under certain Islamic women's organizations, they made real contributions to the women's political movement in Indonesia since they formed women's branches of existing mass organizations. Fatayat, this organization is the sister branch of the largest Islamic organizations in Indonesia: Nahdlatul Ulama. This paper narrates that the involvement of Fatayat in politics had its historical and genealogical roots since Soekarno era. Sukarno facilitated Fatayat to develop power capacity in politics. However, during Soeharto era Fatayat experienced a setback due to New Order's control toward women's organization with its "ibuisism" ideology. In order to maintain its existence, Fatayat decided to collaborate with government by incorporating state's program such as PKK, Posyandu into their activities while also made network with national and international funding organization.

Keywords: politics, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Abstrak:

Perempuan Muslim Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik sejak era kolonial sampai dengan sekarang. Selama era kolonial, organisasi perempuan Muslim merupakan cabang dari organisasi masa muslim. Fatayat adalah saudari bagi organisasi massa bernama Nadlatul Ulama. Mereka memberikan kontribusi besar dalam proses pemberdayaan perempuan. Tulisan ini menarasikan keterlibatan Fatayat dalam politik yang secara genealogis ada sejak jaman Soekarno. Soekarno memberikan kesempatan pada Fatayat untuk mengembangkan kapasitas politiknya. Akan tetapi, kemudian mengalami kemunduran pada era Soeharto. Soeharto mengontrol organisasi-organisasi perempuan melalui ideology "ibuisisme" Negara. Fatayat kemudian memutuskan meleburkan diri dalam kebijakan pemerintah tersebut dengan terlibat dalam PKK, Posyandu, dll—meskipun juga menerima dan mengembangkan jaringan dengan dunia luar.

Kata kunci: politik, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Pendahuluan

Politik sebenarnya sudah lama menjadi agenda penting bagi Organisasi perempuan Indonesia sejak jaman penjajahan. Badan Konggres Perempuan pada tahun 1938 membuat draft undang-undang yang memberikan hak bagi perempuan untuk memilih di pemilu. Pada tahun 1941 hanya orang Belanda yang mempunyai hak pilih, tetapi perempuan Indonesia belum. Akhirnya, di tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda perempuan Indonesia bisa mendapatkan hak mereka untuk memilih (Beseel, 2005, p 9). Akan tetapi, sampai beberapa dekade setelah kemerdekaan, kondisi politik perempuan Indonesia tidak ada peningkatan yang signifikan. Karena hal ini, tindakan

afirmatif, menurut Gadis Arivia (2005, p xxx) harus dilakukan. Salah satu dari alasan mengapa tindakan afirmasi ini dibutuhkan bisa dilihat di arena politik di mana keterwakilan perempuan dalam institusi legislatif masih sangat rendah dan bahwa kuota yang fair dan seimbang dalam institusi-institusi tersebut kelihatannya menjadi kebutuhan yang tidak bisa dinegosiasikan lagi (Arivia, p xxx).

Di tahun 2004, ketika untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memberikan suara mereka langsung untuk memilih presiden and anggota parlemen, perempuan Indonesia telah melangkah lebih maju dalam arena politik. Mereka berjuang dan membuat usaha yang besar agar suara mereka didengar dan mendapatkan perhatian di seluruh saluran politik.

Undang undang pemilu Indonesia tahun 2003 nomor 13 menyatakan bahwa sebuah peraturan mendorong setiap partai politik untuk menempatkan perempuan paling sedikit 30 persen dari keseluruhan daftar calon legislatif. Akan tetapi, hal ini bukan berarti jumlah perempuan di parlemen meningkat dengan otomatis. Kenyataannya, di parlemen 2004 - 2009 menurut Cetro (Centre for electoral Reform) hanya berkisar 12 persen dari keseluruhan jumlah anggota perlemen 550 orang. Hal ini bisa juga dikarenakan partisipasi politik perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Dengan demikian, dalam hal ini, mobilisasi politik perempuan sangat penting untuk mendorong mereka lebih aktif dalam politik.

Paling tidak ada satu poin penting yang kita dapatkan dari undang-undang Pemilu tahun 2003 yang telah diamandemen dan diwujudkan dalam Undang-undang pemilu 2008. Di pasal 10 UU ini, yang dikenal dengan sistem *zipper* disebutkan, dalam sistem ini, dikatakan bahwa paling sedikit ada satu perempuan dalam daftar tiga tertinggi dalam daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Dan juga, 30 persen dari pengurus partai harus diisi oleh perempuan. Hal ini membuka kesempatan kepada perempuan untuk aktif dalam politik. Itu semua merupakan satu langkah maju bahwa perempuan Indonesia bisa maju dalam pemilu 2009. Dengan undang-undang yang baru diubah tahun 2008, perempuan mempunyai peluang lebih besar untuk terpilih. Dibandingkan dengan pemilu tahun 2004 di mana perempuan ditempatkan di urutan buncit sehingga peluang untuk terpilih sangat kecil.

Akan tetapi, dalam hal peraturan mengenai pemilihan anggota legislatif, banyak partai yang tidak bisa memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif mereka (Antarnews, 2008). Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan hanya mempunyai 27 persen calon perempuan dari 452 calon legislatifnya. Akan tetapi tidak ada hukuman yang memaksa yang diputuskan jika partai gagal menerapkan kerangka undang-undang pemilu. Dengan mempertimbangkan peranan perempuan dalam politik, maka sangat penting untuk mengeksplor sebuah pertanyaan penting: mengapa sangat sedikit perempuan tertarik untuk lebih aktif dalam arena politik? Jawaban paling aman untuk menjawab pertanyaan mengenai strategi dan praktek mobilisasi politik dan bagaimana hal itu diimplementasikan dalam organisasi-organisasi perempuan. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, peranan organisasi-organisasi

perempuan Islam merupakan instrumen yang tak terelakkan untuk memajukan mobilisasi politik perempuan. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu cara strategis untuk mereka mengambil manfaat dan juga mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa organisasi-organisasi perempuan Islam memainkan peranan penting di antara perempuan-perempuan di akar rumput karena mereka punya legitimasi sosial yang kuat (Soetjipto, 2005: 202).

Secara historis, perempuan Muslim Indonesia mempunyai keterkaitan dengan aktivitas politik sejak jaman penjajahan di Negara ini. Pada masa itu, walaupun mereka tidak bekerja secara formal di bawah organisasi Islam perempuan, mereka berkontribusi nyata dalam gerakan politik perempuan di Indonesia sejak terbentuknya cabang perempuan dalam partai politik yang ada. Mengenai masalah mobilisasi politik perempuan, artikel ini akan berfokus pada organisasi Islam Indonesia yaitu Fatayat. Organisasi ini adalah cabang dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Sejarah membuktikan bukti keterlibatan organisasi perempuan di Indonesia. Di Sumatra Barat, sebuah sekolah Islam untuk perempuan (Diniyah Putri) didirikan oleh Rahmah El Yunusiah pada tahun 1923 (Baidlowi, 1991, 83). Institusi ini berkembang ke beberapa provinsi di Jawa, sehingga menarik perhatian perempuan akan pentingnya pendidikan untuk anak perempuan. Akibatnya, banyak pesantren di Jawa yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama mulai menerima santri putri. Contohnya, Pesantren Denanyar mulai menerima santri putri pertamanya pada tahun 1930. Sementara itu, pendirian sekolah-sekolah Islam untuk perempuan di kalangan NU sesungguhnya berakar dari gerakan perempuan di NU yaitu Fatayat dan Muslimat.

Fatayat sebagai organisasi sayap NU mempunyai akarnya dalam nilai-nilai tradisional perempuan. Lumayan menarik menganalisis gerakan politik organisasi ini. Walaupun Fatayat dianggap organisasi sayap yang otonom, kenyataannya Fatayat tidak benar-benar independen dari organisasi induknya, khususnya dalam bidang politik. Untuk menggambarkan hal ini, misalnya di Pemilu 2004, NU secara informal berasosiasi dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Tetapi kenyataannya, Fatayat juga mengikuti organisasi induknya dalam mendukung kompetisi politik. Akhirnya, hasil riset ini diharapkan akan memberikan perspektif yang lebih

luas mengenai peranan perempuan Muslim dalam politik, karena *Fatayat* mempunyai jumlah cabang yang sangat besar dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa. Sekarang ini, *Fatayat* merupakan salah satu organisasi perempuan yang penting di Indonesia. *Fatayat* mempromosikan kesehatan reproduksi, perdagangan manusia, dan pemberdayaan perempuan. Di bidang politik, *fatayat* adalah satu-satunya organisasi keagamaan perempuan yang terlibat dalam advokasi undang-undang pemilu sejak 2003 (Fithriati, 2008, 14). Banyak juga anggota *Fatayat* yang menjadi anggota legislatif. Bisa dikatakan bahwa *Fatayat* sukses dalam bidang gerakan politik. Akan tetapi posisi *Fatayat* dalam bidang politik sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang *Fatayat* sejak jaman Soekarno dan Soeharto. Cara-cara *Fatayat* mempromosikan pemberdayaan perempuan tidak selalu berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa pencapaian *Fatayat* sekarang ini adalah hasil sejarah *Fatayat* di masa lampau. Oleh karena itu, mempelajari sejarah *Fatayat* menjadi sangat penting. Dengan menganalisisnya, saya berharap akan tahu sejarah keberhasilan *Fatayat* sekarang ini di bidang gerakan politik.

Berdasarkan buku *Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran* (2005) yang diterbitkan oleh pengurus pusat *Fatayat NU*, ada beberapa periode dalam perkembangan *Fatayat*. Pertama adalah periode ketika *Fatayat* baru saja didirikan pada tahun 1950-1953. Masa ini disebut masa perintisan. Yang kedua, sebenarnya periode ini masih dianggap sebagai periode perintisan tetapi dalam periode 1953-1969 *Fatayat* sudah berkembang sehingga periode ini dikenal sebagai periode perkembangan. Periode ketiga adalah periode kebangkitan (1979-1995). Disebut dengan periode kebangkitan karena selama dua belas tahun sebagai organisasi keagamaan *Fatayat* menghentikan aktifitasnya. Rezim Orde Baru mengontrol semua organisasi di Indonesia sehingga *Fatayat* dilarang beraktifitas. Periode terakhir adalah *Fatayat* di era demokrasi yaitu di tahun 1995-2005. Dalam artikel ini, saya akan menggunakan pengorganisasian yang sederhana berdasarkan periodisasi era politik di Indonesia. Saya akan membaginya dalam dua periode, yaitu era Soekarno dan era Orde Baru. Menurut saya, kategorisasi ini dapat membantu memahami gerakan politik *Fatayat NU*. Sebelum membahas masalah *Fatayat*, saya akan membahas mengenai kondisi organisasi perempuan selama periode penjajahan dalam bidang politik. Saya mengajukan bagian ini

untuk memberikan latar belakang mengenai posisi organisasi perempuan ketika *Fatayat* didirikan.

Organisasi-organisasi Perempuan dan Politik di Era Penjajahan

Beberapa sumber menginformasikan bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan figur yang terkenal dan menginspirasi bagi para perempuan untuk mendorong dan menyatukan mereka dalam kegiatan sosial dan pergerakan seperti organisasi-organisasi di bidang pendidikan (Suryochondro, 1984; Vreede-De Stuers, 1960; Blackburn, 2004; Martyn, 2005). Melalui suratnya kepada teman Belandanya, Stella Zeehandelaar, selama rentang 1899-1903, Kartini membongkar tradisi perempuan yang terbelakang di jaman itu. Menurut Suryochondro (1984), ada dua faktor pendukung mengapa perempuan Indonesia bisa berkembang. Yang pertama adalah komunikasi di mana media membantu menyebarkan konsep pemberdayaan perempuan keseluruh negeri. Sehingga perempuan menjadi lebih peduli akan pentingnya organisasi untuk menyatakan hak perempuan. Yang kedua adalah semangat gotong royong, salah satu budaya Indonesia yang menginspirasi perempuan untuk membantu rekan perempuan mereka dalam kelompok yang terorganisir (p.86).

Akan tetapi, sepertinya Suryochondro tidak melihat pengaruh kolonialisme sebagai salah satu inspirasi pendirian organisasi-organisasi perempuan di Indonesia. Blackburn (2004) menyebutkan bahwa ideologi gender kolonial ikut membentuk ide organisasi perempuan di Indonesia, khususnya dalam hal model pendorongan pendidikan untuk anak perempuan (p.18). Argumen ini bisa diterima jika kita melihat sejarah Kartini. Pada masa Kartini dan sesudahnya, pendidikan paling dekat hanya untuk orang Belanda. Kartini sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan untuk anak perempuan yang dia bagi dengan teman di sekolah Belandanya. Selain itu, gelombang pertama feminisme yang berkembang di Negara barat di mana semangat perubahannya juga berhembus ke Indonesia. Jadi masa penjajahan juga membawa semangat kemajuan untuk perempuan Indonesia. Taufik Abdullah (1991) akan tetapi menyatakan bahwa organisasi perempuan sangat sedikit memainkan peranan sebagai pencetus isu-isu baru. Mereka hanya seperti penterjemah dan pembela isu-isu yang sudah ada yang sebenarnya sudah dinyatakan oleh grup lain (hal. 74). Jika mereka mengembangkan hal baru, hanya khusus tentang isu perempuan bukan isu sosial yang lebih luas (ibid),

misalnya ketika perempuan berpendapat bahwa jika laki-laki bisa melakukan sesuatu yang baru dan penting, maka perempuan harus bisa melakukannya juga.

Dengan kata lain Abdullah mengatakan bahwa perempuan tidak memperkenalkan agenda kreatif, tetapi mungkin Abdullah tidak melihat bagian di mana hak-hak perempuan pada masa penjajahan hampir tidak tersentuh. Terlebih lagi, budaya patriakal menutup akses perempuan ke ranah publik. Akan tetapi tidak ada yang meragukan bahwa organisasi perempuan telah berhasil memecahkan bagaimana cara-cara perempuan mendapatkan hak mereka, misalnya hak dasar manusia, pendidikan. Anggapan bahwa organisasi perempuan Indonesia hanya pengikut organisasi laki-laki hanya menafikan kenyataan bahwa perempuan telah membuka kesempatan untuk perempuan mencapai tujuan mereka. Selama masa penjajahan, sebenarnya ada beberapa agenda penting dari organisasi-organisasi perempuan yaitu pernikahan, pendidikan dan politik. Agak lebih sedikit dari pencapaian isu pendidikan dan pernikahan, dalam bidang politik, organisasi perempuan masih sangat jauh dari tujuan mereka. Usaha-usaha yang lumayan dalam politik telah dibuat di tahun 1951 ketika Poeteri Mardika mengirimkan sebuah mosi ke Gubernur Jenderal untuk mengeluarkan hak yang setara dalam hukum antara laki-laki dan perempuan (Suryochondro, 1984: 88). Sebelum itu, tidak ada catatan mengenai aktifitas politik organisasi-organisasi perempuan.

Satu langkah maju dalam politik dicapai oleh organisasi-organisasi perempuan ketika Badan Konggres Perempuan pada tahun 1938 membuat draft Undang-undang yang memberikan hak kepada perempuan untuk memilih dalam pemilu. Vreede-De Stuers (1960) mengatakan bahwa, "ini merupakan reaksi melawan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi hak perempuan Indonesia untuk dipilih dalam kantor tertentu tetapi menolak hak mereka untuk memilih," (hal. 94 -95). Akan tetapi, pada tahun 1941 banyak perempuan Belanda yang mempunyai hak memilih, perempuan Indonesia belum. Akhirnya, pada tahun-tahun terakhir pendudukan Belanda perempuan Indonesia bisa mendapatkan hak mereka untuk memilih (Bessel, 2005, p. 9). Blackburn (2008) berpendapat bahwa beberapa partai politik mempunyai organisasi sayap perempuan di akhir tahun 1920an seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (p.85). Pada saat itu perempuan mulai berpidato secara publik. Hal itu

merupakan pencapaian yang bagus. Organisasi ini juga mendorong perempuan untuk bergabung dalam gerakan kemerdekaan (p.89).

Perempuan Muslim juga mempunyai peranan penting dalam politik. Walaupun mereka tidak berjalan di bawah organisasi perempuan Islam, mereka mempunyai kontribusi nyata dalam gerakan politik Indonesia karena mereka bergabung ke partai-partai melalui organisasi sayap perempuannya. Blackburn (2008) menegaskan bahwa dalam masa kolonial para perempuan Muslim terlibat dalam organisasi Islam radikal bukan moderat. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, kondisi ini berubah seiring dengan yang terjadi dalam agenda politik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Meskipun tidak sekuat organisasi perempuan sekular, organisasi perempuan Islam mempunyai pengaruh yang signifikan di area perpolitikan Indonesia. Secara umum, politik merupakan bagian dari agenda sentral dimana organisasi-organisasi perempuan terlibat selama masa penjajahan. Dan juga mereka telah mencapai tujuan politis untuk mendapatkan hak untuk memilih bagi perempuan. Walaupun perempuan sekarang bisa memilih, hal ini bukan berarti perempuan sudah setara dengan laki-laki di bidang politik. Organisasi-organisasi perempuan masih berjuang untuk mencapai agenda pemenuhan minimum 30 persen jumlah perempuan di DPR.

Fatayat di Era Soekarno: Pemberdayaan Kapasitas Politik

Sebagai organisasi otonom di Nahdlatul Ulama, sejarah Fatayat NU tidak bisa dipisahkan dari sejarah NU. Di awal abad 20, Islam menyebar dengan baik di Indonesia. Masyarakat mulai mencampurkan budaya tradisional dengan ajaran Islam. Misalnya tradisi slametan di Indonesia yang disisipi beberapa ajaran Islam seperti tahlil. Sebenarnya kombinasi ini merupakan salah satu metode untuk mengenalkan Islam ke masyarakat Indonesia. Sunan Kalijaga merupakan salah satu Wali Songo di Jawa yang menggunakan wayang untuk menyebarkan Islam. Pendekatan ini efektif karena masyarakat merasa bahwa Islam tidak berseberangan dengan budaya mereka. Akan tetapi, kelompok-kelompok yang mendeklarasikan mereka sebagai pembaharu Islam mempromosikan gerakan pembaharuan. Menurut mereka, semua aktifitas yang mengkombinasikan budaya Islam dan budaya tradisional harus ditinggalkan karena Islam harus memurnikan aktifitasnya dari kegiatan yang bukan berasal

dari ajaran Islam. Para pembaharu berpendapat bahwa ilmuwan Islam tidak punya otoritas untuk menafsirkan al Quran dan Hadits. Mereka menyarankan masyarakat Indonesia kembali ke sumber asli yaitu Quran dan Hadits (Feillard, 1999, p. 5-7).

Gerakan ini mempengaruhi para kyai terutama di Jawa. Kyai yang merasa sebagai kyai tradisional berusaha untuk menolak gerakan pembaharuan. Sayangnya, saat itu gerakan para kyai itu tidak terorganisir tetapi hubungan yang terbuka sudah terjalin. Salah satu cara untuk menolak gerakan pembaharuan adalah dengan membuka madrasah seperti Kyai Wahab dengan madrasah "Nahdlatul Wathan". Madrasah ini menjadi embrio Islam tradisional. Sejak itu, Islam tradisional berkumpul dan pada 30 Januari 1926 mereka membentuk organisasi bernama Nahdlatul Oelama (NO) dengan sekarang menggunakan Bahasa Indonesia yang standar menjadi Nahdlatul Ulama (NU) (Feillard, 1999, p. 12). Dari sinilah NU berkembang. Jika kita mau mempelajari Islam di Indonesia kita tidak bisa menghindari untuk mempelajari NU. Faktanya, keterlibatan NU di Indonesia bukan hanya dalam kegiatan agama, tetapi juga dalam politik. Pada masa penjajahan, NU aktif dalam politik dan terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. NU juga berkontribusi membawa Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia. Di sisi lain NU mengembangkan organisasi internalnya. Selama masa penjajahan Belanda di tahun 1935, NU mempunyai 65 cabang dan sekitar 67.000 anggota. Tiga tahun kemudian, NU menjadi 99 cabang dan cabang-cabangnya berkembang tidak hanya di Jawa tetapi juga di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan (Haidar, 1991: 141). Salah satu hal penting dari perkembangan NU adalah pembentukan cabang perempuan yaitu Muslimat dan Fatayat.

Menurut Makhrusah (2005), pada era penjajahan perempuan tidak bisa menjadi bagian dari NU, bukan hanya karena diskusi masalah domestik di wilayah umum tetapi juga adanya represi dari pihak penjajah Belanda terhadap organisasi di masa akhir penjajahan, sehingga akan beresiko bagi perempuan jika berkumpul (p 22-23). Di akhir tahun 1940an, ada kesadaran di antara anggota NU termasuk generasi muda perempuan NU. Mereka menyadari bahwa perempuan NU belum terorganisir baik perempuan dewasa maupun para perempuan muda. Keberadaan perempuan NU hanya menjadi pengikut. Kathryn Robinson (2009) mencatat bahwa opresi Belanda

dan internal NU sendiri tidak pernah menghentikan perempuan untuk berpartisipasi di NU. Sebagai contoh, pada waktu Konggres NU di Banten tahun 1939 ada sekitar 8000 perempuan yang menghadiri (h.53). Di kemudian hari, NU mengumpulkan para perempuan dari level Nyai, yaitu istri Kyai. Dari ini terbentuklah Muslimat. Akan tetapi organisasi ini tidak menyentuh kaum muda perempuan NU, maka dibentuklah organisasi untuk mewadahi kaum muda perempuan NU. Ketua NU saat itu adalah KH Ahmad Dahlan, dan organisasi ini bernama Fatayat. Sebenarnya masih ada perdebatan di antara pengurus NU dan para kyai NU. Kyai menolak perempuan aktif dalam NU, menurut mereka, perempuan harus tinggal di rumah. Akan tetapi banyak kyai progresif yang mendukung perempuan menjadi bagian dari NU. Walaupun perdebatan masih terus berlangsung, Fatayat secara formal diterima sebagai organisasi otonom NU di tahun 1952 di Mukhtar Palembang (Fatayat website, 2010).

Pendirian Fatayat tidak bisa dipisahkan dari tiga perempuan penting yaitu Aminah Mansur dari Gresik, Khuzaimah Mansur dari Gresik dan Mustasyirah dari Surabaya. Para perempuan itu dikenal sebagai Tiga Serangkai. Karena saat itu pusat NU di Jawa Timur, Fatayat juga didirikan dan berkembang di Jawa Timur. Dahlan meminta mereka untuk memformulasikan Fatayat. Pengurus Muslimat juga membantu mereka dalam proses ini. Nihayah Bakri ditunjuk sebagai ketua Fatayat yang pertama (Afifah, 2005, p 10). Proses pendirian Organisasi Fatayat NU tidaklah mudah. Hambatan dan kesulitan yang ditulis oleh Khusnul Khotimah (2005), ada beberapa kesulitan dalam mewujudkan Fatayat NU: (1) Secara struktur banyak Kyai yang merupakan Syuriah (Dewan penasehat) tidak mendukung Fatayat. Sebagai contoh, KH Bisri Syamsuri sangat menentang pendirian Fatayat. Syamsuri khawatir perempuan akan menjadi liar jika terlalu aktif dalam organisasi di luar rumah. Dukungan dari Ketua NU, Dahlan bukan jaminan jika Fatayat diterima oleh dewan syuriah. (2) Struktur patriarkal masih sangat kuat di Indonesia dan hal itu tidak menguntungkan bagi Fatayat. Fatayat menjadi sangat tergantung pada NU. Dalam setiap aktifitas yang akan dilaksanakan Fatayat harus mendapat ijin dari Pengurus NU. Kegiatan sering dibatalkan hanya karena ijin dari pengurus NU. NU masih didominasi oleh para kyai yang masih berasumsi bahwa pekerjaan perempuan itu di rumah. (3) Sedikitnya sumber daya manusia di antara pemuda NU adalah problem lainnya. Pada saat

itu, Fatayat tidak mempunyai banyak perempuan dengan pendidikan tinggi. Pendidikan masih menjadi hal yang mahal bagi perempuan. Hal ini menjadikan perkembangan Fatayat lambat karena pengurus dan anggota Fatayat tidak mempunyai kemampuan berorganisasi (Afifah, 2005: 11-12).

Sejak periode ini Fatayat sering menyelenggarakan pelatihan untuk anggotanya. Pelatihan difokuskan dalam banyak aspek seperti pendidikan. Fatayat mengajari anggotanya bagaimana mendirikan institusi pendidikan dan bagaimana mengajar. Sebagai hasilnya beberapa anggota Fatayat mulai membuat Taman Kanak-kanak. Mereka juga membantu para perempuan di masyarakat mereka untuk menghapuskan buta huruf. Pada saat itu menjadi hal biasa jika perempuan bisa membaca Arab tetapi tidak bisa membaca Bahasa Indonesia (Afifah, 2005: xvi). Organisasi juga poin penting dalam pelatihan. Untuk memberikan kontribusi dalam revolusi, beberapa anggota Fatayat bergabung dalam pelatihan militer seperti misalnya bagaimana cara menggunakan senjata dan sebagainya, contohnya Asnawiyah (h.xvi).

Dalam bidang politik di era Soekarno, Fatayat dan Muslimat mengambil peranan yang penting. Aisyah Hamid Baidhowi yang merupakan salah satu pioneer Fatayat memberikan gambaran mengenai kondisi politik dan posisi perempuan NU pada saat itu. Selain itu dalam bidang pendidikan, ketika kami memberikan perhatian untuk bekerja sama dengan elemen pemuda lainnya. Dulu biasanya ada forum untuk organisasi pemuda Muslim. Jika ada masalah, kami bertemu di forum itu sebelum ke forum yang lebih besar. Forum pemuda Islam juga menjadi embrio KNPI. Pada tahun 1954, ketika umat Islam membahas pernikahan di bawah umur dan penghapusan buta huruf, Fatayat juga terlibat dengan intensif. Ada plenary di mana Fatayat dan Muslimat ikut. Kemajuan pemikiran muncul ketika keputusan Muslimat diberi kesempatan sebagai pimpinan umum dengan nyata bukan hanya di kalangan umat Islam.

Dengan demikian, permintaan menguat di kalangan Muslim perempuan untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Pada tahun 1955, perwakilan perempuan yang ada di parlemen adalah Machmudah Mawardi dan Asmah Syahrani. Pada kongres NU tahun 1957, NU memutuskan dengan resmi keterlibatan perempuan dalam politik, walaupun di pemilu sebelumnya tahun 1955 sudah ada anggota legislatif perempuan dari NU yang

mendapatkan lima kursi dari fraksi NU. Dalam susunan konstituen, seingat saya, meningkat menjadi sembilan orang termasuk Nihayah Bakry yang selanjutnya dikenal dengan Nihayah Maksom. Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno membuka kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam politik. Posisi Muslimat NU bukan hanya dalam legislatif tetapi juga di eksekutif di Departemen Agama yaitu Machmudah Mawardi. Aisyah Dahlan pada saat itu menjadi sekretaris Menteri Agama. Perempuan yang lain yaitu Abidah Maksom sebagai hakim perempuan pertama (Afifah, 2007). Beberapa anggota Fatayat menjadi anggota DPRDS. Sebagai contoh Asnawiyah pada tahun 1951-1956 menjadi anggota DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) di Gresik, Jawa Timur. Menurut Asnawiyah, saat itu hanya ada tiga perempuan di DPRDS yaitu Fatimah dari Muslimat, Zulaikha dari GPII dan Asnawiyah sendiri yang ditunjuk dari Fatayat (Afifah, 2005: 40). Walaupun debat mengenai keberadaan perempuan di sayap organisasi NU terus berlangsung, Syuriah NU mulai menerima perempuan sebagai pengurus di tahun 1956, yaitu Khairiyah Hasyim, Fatmah, and Mahmudah Mawardi (h. xix). Ini adalah bukti bahwa perempuan NU bisa eksis di dalam organisasi.

Secara umum, era Soekarno adalah titik penting bagi Fatayat karena sejak era ini Fatayat didirikan, pemerintah juga mempunyai pengertian yang baik dalam konsep kesetaraan gender. Fatayat yang merupakan organisasi perempuan baru juga punya kesempatan yang sama di parlemen. Hasilnya adalah Fatayat bisa mengambil tempat dalam pergerakan perempuan di Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan, Fatayat bisa mengembangkan organisasi internalnya. Posisi NU yang merupakan salah satu partai politik memberi kesempatan kepada generasi muda yang terlibat di Fatayat NU untuk belajar bagaimana untuk aktif dalam politik walaupun perdebatan di antara pengurus NU tidak bisa dihindari mengenai keberadaan Fatayat. Akan tetapi hal itu tidak menghentikan langkah Fatayat dalam berkontribusi untuk pemberdayaan perempuan.

Fatayat di Era Orde Baru: Ideologi Ibuisme Negara

Sebenarnya Soeharto menjadi presiden Indonesia secara resmi pada tahun 1967. Tetapi faktanya rezim Orde Baru mulai setelah kudeta di tanggal 1 Oktober 1965. Pada tahun 1965, militer Indonesia berusaha membunuh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam tragedi ini ratusan orang terbunuh dan NU sebagai organisasi Islam terbesar serta partai

politik terlibat dalam tragedi ini. Menurut Katharine McGregor (2008), pada Januari 1966 kepemimpinan NU menegaskan bahwa "PKI harus disapu bersih dari wajah Indonesia dan tidak pernah diberi kesempatan untuk ada lagi," (h.4). PKI dianggap sebagai partai yang menolak adanya Tuhan. Sehingga bukan hanya NU yang mendukung penghancuran PKI tetapi juga organisasi keagamaan lainnya dari Islam, Katolik dan Kristen. *Fatayat*, dalam kenyataannya sebagai bagian dari organisasi NU juga mengikuti apa yang dipercayai oleh NU (McGregor, 2008: 5). I Gusti Agung Ayu Ratih (2009) berpendapat bahwa keterlibatan organisasi perempuan dalam tragedi kemanusiaan di Indonesia berkontribusi penting dalam menyembunyikan cerita para korban perempuan. Pada saat itu bukan hanya anggota PKI yang menjadi sasaran kampanye hitam tetapi juga organisasi perempuan yang dianggap PKI seperti Gerwani. Akan tetapi cerita mengenai Gerwani tidak pernah dibuka (p.18-19).

Setelah Soekarno jatuh, rezim Orde Baru mulai. Dalam era ini, menjadi sejarah baru bagi organisasi perempuan termasuk *Fatayat*. Soeharto berdiri berseberangan dengan presiden sebelumnya mengenai posisi perempuan. Jika Soekarno membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkembang, sebaliknya, Soeharto ingin membawa kembali perempuan di wilayah domestik. Konsep "ibuisme" menjadi ide dasar rezim ini untuk mengontrol perempuan. Dalam konsep Ibuisme menurut Djajaningrat-Nieuwenhuis (1987) bahwasannya secara social dan politik, Bapak dan Ibu menjadi center, sehingga tanggungjawab semua hal yang menyangkut keluarga atau group berada di pundak Bapak dan Ibu. Namun ada perbedaan mendasar antara posisi Bapak dan Ibu. Power dan juga keistimewaan berada di tangan Bapak, sedangkan Ibu tidak boleh mengharapkan balasan apapun dari tanggungjawab yang diembannya kecuali balasan itu diberikan melalui suaminya. Susan Blackburn (2004) dan Julia Suryakusuma (1987) menyatakan bahwa ibuisme adalah ideologi gender Orde Baru (p. 25). Orde baru menyadari betul bagaimana fungsi Ibu untuk menjaga stabilitas Negara. Mereka dimobilisasi untuk mensupport pembangunan negara, berkontribusi dalam ekonomi keluarga, namun di satu sisi hal tersebut dilakukan dengan sukarela, tanpa ada reward apa-apa. Bahkan negara secara sengaja membenturkan perempuan dengan konsep-konsep *private sphere*, sehingga perempuan dengan sempurna berada pada posisi yang tidak

memiliki hanya sebagai *supporters* bagi keluarga, kelompok, bahkan negara. Implikasi dari ideologi ini adalah bahwa kodrat perempuan adalah melahirkan, menjadi ibu rumah tangga dan ibu. Di setiap kesempatan, pemerintah menyebarkan ide ini. Pemerintah juga membuat organisasi perempuan sebagai duta dalam mengembangkan ideologi ini. Contohnya, Dharma Wanita dibuat untuk istri para pegawai negeri, dan agenda utama organisasi ini yaitu mensponsori PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) (h.25).

Implikasi dari ideologi dari pemerintah yaitu semua aktifitas organisasi-organisasi perempuan harus di bawah kontrol pemerintah. Sebenarnya kondisi ini tidak hanya berlaku bagi *Fatayat* atau organisasi perempuan lainnya tetapi juga NU. Pengurus dan anggota NU takut sehingga mereka tidak bisa mendatangi kegiatan organisasi. Jika mereka tetap meneruskan kegiatan organisasi mereka, konsekuensinya mereka dipecat dari pekerjaan mereka. Oleh karena itu, selama 12 tahun dari 1967-1979, *Fatayat* tidak mempunyai aktifitas yang berarti bisa dikatakan *Fatayat* mati suri. Aisyah Hamid Baidhowi menilai bahwa periode ini banyak pengurus *Fatayat* di cabang-cabang *Fatayat* menolak untuk dikunjungi karena mereka khawatir mereka akan menerima intimidasi dari pemerintah. Beliau berkata:

Ada sebuah cerita, ketika Asmah H, Syahrini dan H..S.A Wahid Hasyim pergi ke cabang Muslimat. Mereka sering dikirim surat penolakan untuk datang di komite Muslimat. Misalnya, ketua Muslimat yang dulu di Ponorogo menolak karena anaknya kepala desa. Daripada dia membahayakan anaknya, dia menulis: "Saya masih mencintai Muslimat, tapi tolong jangan datang ke rumah kami" (Afifah, 2005: xx).

Hal ini menggambarkan situasi pada saat itu. Masyarakat hidup dalam intimidasi pemerintah. Walaupun *Fatayat* masih mempunyai pengurus dengan ketuanya saat itu Malichah Agus, aktifitas berhenti. Setelah vakum selama periode 12 tahun ini, *Fatayat* mulai aktifitas dengan mengadakan kongres di Semarang pada tahun 1979. Mahfudhoh Ubaid Ali dipilih sebagai pimpinan umum *Fatayat*. Konsolidasi *Fatayat* dengan semua cabang-cabangnya di Indonesia dilakukan lagi. Aktifitas *Fatayat* di permulaan kebangkitannya dilakukan dengan rahasia. Resiko intimidasi dari pemerintah membuat *Fatayat* menggunakan cara ini. Akan

tetapi, ketika Fatayat ikut dalam beberapa kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah, aktifitas Fatayat tidak lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Fatayat mendukung program-program pemerintah seperti Keluarga Berencana. Bergabung dengan pemerintah menjadi pilihan Fatayat untuk menghindari pelarangan dari pemerintah (Afifah, 2005: xx). Kebijakan pengurus Fatayat untuk berkolaborasi dengan program pemerintah seperti posyandu, apotik hidup, dasa wisma bertentangan dengan NU. NU sebagai organisasi induk Fatayat telah mengumumkan untuk kembali ke Khittah 1926 pada muktamar 1984 di Situbondo. Ini berarti NU tidak lagi terlibat dalam politik praktis.

Ketidakbebasan Fatayat untuk beraktifitas semakin menjadi karena persoalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku ketua NU saat itu dengan Soeharto. Pada masa jabatan pertama Gus Dur, hubungan NU dan pemerintah berjalan baik, bahkan Gus Dur menjadi salah satu pendorong ideologi Pancasila, namun Gus Dur saat itu tetap kritis kepada pemerintah terutama mengenai kasus Waduk Kedung Ombo yang mendapat kucuran dana dari World Bank. Pada masa jabatan kedua yang dimulai tahun 1989 hubungan Gus Dur dan Soeharto semakin meruncing, hingga ada kejadian Soeharto menghalangi acara perayaan ulang tahun NU yang ke-66 di Jakarta. Bahkan ketika untuk ketiga kalinya Gus Dur maju kembali mencalonkan sebagai ketua NU, Soeharto menggunakan tangan-tangannya untuk menghalangi agar Gus Dur tidak terpilih kembali. Namun tetap saja, Gus Dur menerima amanah itu kembali. Situasi ini tentu juga sangat mempengaruhi Fatayat. Kerja sama Fatayat dengan Orde Baru ditakutkan akan membawa NU kembali ke arena politik. Pada saat itu NU menjaga kenetralannya dalam politik.

Namun sebagai organisasi, Fatayat tidak mau berpangku tangan hanya karena tekanan dari orde baru. Fatayat berusaha untuk tetap melakukan kegiatan, Neng Dara Afiah menjelaskan, "Saat itu kami melakukan kompromi-kompromi untuk tetap berkegiatan, yang pertama Fatayat lakukan adalah menarik diri dari politik, seperti yang dilakukan oleh induk organisasinya, yakni NU. Langkah yang kedua adalah Fatayat melakukan modernisasi pada organisasi dan kegiatannya seperti dalam cara kerja dan juga jenis kegiatannya (Fatayat pernah terlibat aktif dalam distribusi Vitamin A di perkotaan). Dengan dua langkah ini Fatayat tetap bisa menjalankan kegiatan tanpa mendapat tekanan dari orde baru." Gus Dur sendiri sebagai

pimpinan NU, terus mendorong Fatayat untuk terus berkegiatan. Dari hal ini, Fatayat membuat jaringan dengan organisasi nasional dan internasional yang fokus pada isu-isu perempuan, dan dari jaringan ini, Fatayat bisa membuat pelatihan buat anggota-anggotanya. Pada dasarnya pada periode ini, seperti halnya organisasi perempuan lainnya, Fatayat mulai mengadakan diskusi mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan gender. Walaupun selama Orde Baru, Fatayat tidak mempunyai kesempatan dalam bidang politik, Fatayat fokus pada konsolidasi untuk menyebarkan ide kesadaran hak-hak perempuan dan pemberdayaan. Nia Sjarifudin (2009) menyatakan bahwa gerakan perempuan di masa ini adalah kaderisasi. Hal ini terjadi di Fatayat sehingga ketika rezim Orde Baru jatuh, Fatayat sudah mempunyai kader yang bagus dan jaringan yang memadai. Dalam bidang politik di era Orde Baru, Fatayat mempunyai dua periode penting. Yang pertama yaitu periode vakum. Pada saat ini Fatayat tidak mempunyai banyak aktifitas. Penyebabnya adalah faktor internal dan eksternal. Periode kedua yaitu periode kebangkitan. Kolaborasi untuk mendukung program-program pemerintah mengenai perempuan dan keluarga menjadi titik masuk bagi Fatayat untuk eksis kembali. Di akhir masa Orde Baru ini, Fatayat mendapatkan kesempatan untuk membuat hubungan dengan organisasi donor nasional dan internasional. Bisa saya katakan bahwa sepuluh tahun terakhir pada periode ini adalah akar dasar dari Fatayat dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan.

Penutup

Dari penjelasan di atas, saya menyimpulkan beberapa poin. *Pertama*, Fatayat didirikan karena beberapa alasan. Saat itu, perempuan NU belum terorganisasi. Di sisi lain, kemauan perempuan NU khususnya organisasi pemuda untuk terlibat dalam organisasi perlu diapresiasi sehingga Dahlan sebagai pimpinan NU pada saat itu meminta perempuan untuk mendirikan Fatayat. Muslimat membantunya untuk merealisasikan ide ini. Sebab lainnya adalah Nahdlatul Ulama pada dasarnya mendukung perempuan untuk aktif dalam arena publik. *Kedua*, Fatayat bisa berkembang karena faktor-faktor internal dan eksternal. Salah satu aspek internal adalah dukungan penuh dari pengurus NU progresif. Anggota potensial Fatayat juga menjadi sebab penting bagi Perkembangan Fatayat. Faktor eksternal berasal dari pemerintah. Selama era Soekarno, perempuan mempunyai kesempatan untuk aktif

dalam dunia politik. Beberapa perempuan menjadi anggota legislatif dan beberapa perempuan NU mempunyai jabatan penting dalam pemerintahan. Keterlibatan NU dalam politik praktis juga menjadi kesempatan bagi *Fatayat* untuk terlibat dalam politik. Yang *ketiga*, di Era Orde Baru, *Fatayat* berada dalam dua kondisi. Pada masa awal, *Fatayat* vakum karena pemerintah mengontrol semua organisasi. Sehingga akhirnya *Fatayat* memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan melaksanakan program-program pemerintah. Hal itu menjadi cara bagi *Fatayat* untuk eksis. Di akhir masa Orde Baru, *Fatayat* mulai menunjukkan keberadaannya dengan mempromosikan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dengan dukungan organisasi nasional dan internasional, *Fatayat* mulai mempromosikan isu-isu perempuan khususnya di bidang politik. Dari poin-poin ini, bisa saya lihat bahwa di masa lalu, keberadaan *Fatayat* tidak bisa dipisahkan dari NU. Dalam banyak hal, *Fatayat* bergantung pada NU sebagai organisasi patron. Walaupun banyak pertentangan opini antara NU dan *Fatayat*, *Fatayat* tidak pernah menyerah untuk bernegosiasi dan menemukan solusi terbaik. Dalam bidang politik, *Fatayat* tergantung pada NU walaupun *Fatayat* adalah organisasi independen. Kesuksesan *Fatayat* dalam hal gerakan politik di masa sekarang ini juga merupakan kontribusi dari pemerintahan Soekarno.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1991). *Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Islam di Indonesia*. Paper presented at the Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual.
- Arivia, G. (2005). Pengantar. In Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- AntaraNews. (2008). *Empat Partai Tidak Bisa Isi Caleg Perempuan*. Retrieved December 3, 2008, from <http://www.antara.co.id/arc/2008/9/28/empat-partai-tidak-mampu-isi-caleg-perempuan/>
- Afifah, N. D.(ed.) (2005). *Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran*. Jakarta: Fatayat NU.
- Ayu, I. G. A. (2009). *Jejak-Jejak Perbincangan Perempuan dalam* Sejarah, in *Jurnal Perempuan* No 63. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Bessel, S. (2005). Indonesia. In Y. G. M. Tremblay (Ed.), *Sharing Power: Women, Parliament, Democracy*. Burlington, USA: Ashgate.
- Blackburn, S. (2004). *Women and The State in Modern Indonesia*. United Kingdom: Cambridge University Press
- Baidlowi, A. H. (1991). *Profil Organisasi Wanita Islam: Study Kasus Muslimat NU*. Paper presented at the Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual.
- Doorn-Harder, P. V. (2006). *Women Shaping Islam: Rereading the Qur'an in Indonesia*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Feillard, A. (1999). *NU vis-à-vis Negara*. Yogyakarta, LKIS.
- Fitriani, M. (2008). *Pengtingkah Advokasi Paket RUU Politik?*. In magazine *Suara Fatayat*, 05/02/May/2008. Jakarta: PP Fatayat NU.
- Haidar, A. (1991). *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Dissertation for Doctoral Program. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Machrusah, S. (2005). *Muslimat and Nahdlatul Ulama: Negotiating Gender Relations within A Traditional Muslim Organization in Indonesia*. Thesis for Master of Arts in Asian Studies, Canberra, ACT: ANU.
- McGregor, K. (2008). *Syarikat and the Move to Make Amends for the Nahdlatul Ulama's Violent Past*. Paper series no 107. Singapore: Asian Research Institute
- Martyn, E. (2005). *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in A New Democracy*. London and New York: RoutledgeCurzon.
- Rinaldo, R. (2007). *Mobilizing Piety: Women, Islam, and the Public Sphere in Indonesia*. University of Chicago. Chicago, Illinois
- Robinson, K. (2009). *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. USA: Routledge.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta Indonesia: Kompas
- Sjarifudin, N. (2009). *Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Sejarah*. in *Jurnal Perempuan* No 63. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Suryochondro, S. (1984). *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Vreede-De Stuers, C. (1960). *The Indonesian Women: Struggles and Achievements*. Netherlands: Mouton & Co.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Prof. Jeffrey Winters
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik.....	iii-iv
Artikel / Articles	
• Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / <i>Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election</i>	175-182
<i>Rocky Gerung</i>	
• Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / <i>Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election</i> ...	183-189
<i>Gadis Arivia</i>	
• Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir <i>Al Hurriyah</i> , <i>Al Musawah</i> , <i>Al Karamah</i> dan <i>Al Adalah</i> / <i>Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah</i>	191-196
<i>Husein Muhammad</i>	
• Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / <i>Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History</i>	197-205
<i>Nihayatul Wafiroh</i>	
• Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / <i>The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics</i>	207-219
<i>Ira D. Mangililo</i>	
• Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / <i>Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women</i>	221-226
<i>Indraswari</i>	
• Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / <i>Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election</i>	227-232
<i>Anita Dhewy</i>	
• Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / <i>Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other</i>	233-240
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / <i>Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!"</i>	241-243
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	
245-246	
Profil / Profile	
• Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme Agama" / <i>Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism"</i>	247-251
<i>Mariana Amiruddin</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / <i>Political Roles of Women against Fundamentalism</i>	253-256
<i>Anita Dhewy</i>	

